

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DI DESA PURWOGONDO, KECAMATAN
BOJA, KABUPATEN KENDAL**

Annas Dwi Rahayu, Hesti Lestari, Dewi Rostyaningsih

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id



Abstrak

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Guna menjawab berbagai permasalahan yang ada di tingkat desa, maka dalam penerapan *e-government* desa memerlukan suatu perencanaan yang matang. Hal tersebut mendasari adanya inisiatif dari pemerintah tingkat desa untuk menjalankan Sistem Informasi Desa. Kabupaten Kendal menerapkan Sistem Informasi Desa sejak tahun 2019, kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa., Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan penentuan informan melalui teknik *purposive sampling*, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tiga fenomena efektivitas Sistem Informasi Desa, yakni relevansi, variasi laporan atau *output*, dan kualitas informasi dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Desa, antara lain: (1) Sumber daya manusia, yakni kurangnya kemampuan untuk mengelola Sistem Informasi Desa dan belum adanya regulasi mengenai *job description* dari masing-masing tim pengelola Sistem Informasi Desa di tingkat desa, (2) Prosedur, yakni belum adanya Standar Operasional Prosedur untuk memberikan informasi yang berkualitas, dan (3) Komunikasi, yakni belum adanya komunikasi, dukungan atau peran yang terbangun dari Kepala Desa sebagai pelindung maupun dari Sekretaris Desa sebagai ketua pengelola Sistem Informasi Desa.

Kata kunci: Efektivitas, Desa, Sistem Informasi Desa

Abstract

The village has the authority to organize and take care of the interests of its people within the framework of the autonomy of the village itself. In order to answer various problems at the village level, the application of village e-government requires a careful planning. This underlies the initiative of the village-level government to run the Village Information System. Kendal Regency implemented the Village Information System since 2019, then regulated in Kendal Regent Regulation No. 39 of 2019 on Village Information System Development Guidelines as a follow-up to Central Java Governor Regulation No. 47 of 2016 on Village Information System Development Guidelines. This research aims to analyze the effectiveness of Information Systems in Purwogondo Village, Boja Subdistrict, Kendal Regency, as well as identify and analyze inhibition factors. This study uses a type of qualitative descriptive research with the determination of informants through purposive sampling techniques. Data collection techniques are used through observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that based on seven phenomena of effectiveness of village information systems, namely relevance, variation of reports or outputs, and the quality of information can be said to be ineffective. This is due to the presence of obstacles in the application of Information Systems, (1) Human resources, namely the lack of ability to manage village information systems and the lack of regulation regarding job descriptions of each village information system management team at the village level, (2) Procedures, namely the absence of Operational Standard Procedures to provide quality information, and (3) Communication, namely the absence of communication or role built from the Village Head as a protector or from the Village Secretary as the managing chairman of Information System. The support from the Village Chief and the Village Secretary provided has not been felt by the village information system operator.

Keywords: Effectiveness, Village, Village Information System

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut setiap negara untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut bertujuan agar tidak tertinggal dari negara lain, khususnya di negara Indonesia. Berbagai program teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang semakin canggih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas hariannya. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dimanfaatkan diberbagai sektor, baik di dunia pemerintahan (*e-government*), bisnis (*e-commerce*), pendidikan (*e-education*), perbankan (*e-banking*), maupun kegiatan lain yang berbasis pada penggunaan elektronika.

Kemajuan teknologi informasi sangat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang semakin luas jangkauannya, membantu para pelaku pelayanan publik untuk mengambil keputusan. Penggunaan teknologi informasi kini juga dimanfaatkan dalam kegiatan administrasi, pelayanan, pengelolaan data kepegawaian, maupun transparansi informasi publik. Di bidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal sebagai *e-government*. Menurut Suaedi (2010:54), *e-government* ialah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara umum.

Inovasi *e-government* sudah mulai dikembangkan. Inovasi *e-government* dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang menginginkan adanya sistem yang saling terintegrasi. Menurut Derry (2019:1), pengembangan *e-government* di Indonesia didukung oleh regulasi yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Beberapa regulasi tersebut menuntut agar setiap instansi publik untuk mengimplementasikan *e-government* dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang publik yang baik, yakni di tingkat pusat, daerah, maupun desa.

Era digital seperti saat ini sejalan dengan revolusi industri 4.0. Hal tersebut mengakibatkan semakin berkembangnya teknologi informasi di kalangan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa

Tengah. Seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha/perusahaan maupun pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan dan pemberian transparansi kepada publik.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Jawa Tengah diwujudkan melalui penerapan *e-government*. *E-government* merupakan suatu sistem di mana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet. *E-government* dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada publik. Penerapan *e-government* di Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adanya regulasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki strategi perencanaan dalam rangka membangun *e-government*. Penerapan *e-government* ini tidak hanya diterapkan pada lingkup Provinsi saja, melainkan juga diterapkan di lingkup Kabupaten/Kota, bahkan sampai ke Desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Guna menjawab berbagai permasalahan yang ada di tingkat desa, maka dalam penerapan *e-government* desa memerlukan suatu perencanaan yang matang. Hal tersebut mendasari adanya inisiatif dari pemerintah tingkat desa untuk menjalankan Sistem Informasi Desa. Pernyataan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mengembangkan sistem informasi desanya. Harapan baru muncul setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut membawa harapan baru, yakni untuk pembangunan tingkat desa. Pada dasarnya, pembangunan tingkat desa membutuhkan suatu sistem informasi. Sistem informasi menjadi sangat penting bagi sebuah desa.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan implementasi *e-government* sebagai salah satu wujud penyelesaian masalah yang muncul pada tatanan pemerintahan desa. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa ini merupakan sebuah sistem informasi yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Adanya Sistem Informasi Desa (SID), dapat membuka

ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa untuk membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan *software*. Program Sistem Informasi Desa (SID) dapat membantu pemerintahan desa dan masyarakatnya, yakni untuk mendokumentasikan data-data milik desa maupun kegiatan masyarakat desa menjadi lebih mudah.

Provinsi Jawa Tengah mulai mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) pada tahun 2016, yang bertujuan sebagai salah satu alat untuk pembangunan desa di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan Sistem Informasi Desa berdasarkan pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Guna mewujudkan Sistem Informasi Desa di setiap pemerintahan desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa. Adanya regulasi tersebut menjadi himbauan bagi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa.

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagian besar telah menjalankan Sistem Informasi Desa. Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah menjalankan Sistem Informasi Desa mulai tahun 2019. Sebagai tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang membuat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa, Pemerintah Kabupaten Kendal menerapkan Sistem Informasi Desa, kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan, yang terbagi menjadi 287 kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Informasi Desa berbasis *website*.

Desa Purwogondo menjadi salah satu Desa di Kecamatan Boja yang menerapkan Sistem Informasi Desa berbasis *website*. Desa Purwogondo memiliki berbagai potensi desa. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tahun 2020, potensi Desa Purwogondo adalah di bidang pertanian, bidang perkebunan, dan bidang peternakan. Potensi di bidang pertanian dengan luas lahan sawah irigasi sederhana sebesar 147 Ha, bidang perkebunan dengan luas sebesar 66,25 Ha, dan bidang peternakan terdiri dari 158 sapi potong dan 160 sapi perah. Adanya potensi yang dimiliki, desa berhak untuk mengenalkan kepada publik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya agar dapat diketahui masyarakat secara umum, serta dapat memanfaatkan maupun mengembangkan potensi yang ada. Potensi desa yang dimiliki oleh Desa Purwogondo dapat dikenalkan melalui Sistem Informasi Desa.

Desa Purwogondo menjadi salah satu Desa di Kecamatan Boja yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tertinggi. Kelima desa tersebut meliputi Desa Meteseh, Desa Boja, Desa Bebengan, Desa Kaligading, dan Desa Purwogondo. Desa Purwogondo menjadi urutan kelima pada desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tertinggi di Kecamatan Boja, yakni sebesar Rp 892,496,000.00. Besaran jumlah dana desa yang dimiliki oleh Desa Purwogondo telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Purwogondo untuk mempublikasikan laporan realisasi dana desa melalui Sistem Informasi Desa. Hal tersebut bertujuan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi atas dana desa yang dimiliki, sehingga masyarakat juga dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai dana desa, serta masyarakat juga dapat berperan untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa Purwogondo dalam merealisasikan dana desa. Desa Purwogondo termasuk 10 dari 18 kelurahan di Kecamatan Boja yang aktif dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* dengan laman <http://purwogondo.kendalkab.go.id/>.

Website Desa Purwogondo mulai aktif pada tahun 2019 sejak diterapkannya Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kendal. *Website* tersebut dikelola oleh Perangkat Desa Purwogondo atau bisa disebut sebagai operator Sistem Informasi Desa (SID). Pemanfaatan *website* Desa Purwogondo sebagai media informasi bagi masyarakat seharusnya memuat berbagai kegiatan atau aktivitas yang ada di Desa Purwogondo, atau kegiatan tersebut dapat dikenal sebagai kabar desa. Pada kenyataannya, *website* Desa Purwogondo belum dimaksimalkan oleh Perangkat Desa Purwogondo atau operator Sistem Informasi Desa (SID) itu sendiri untuk memperbarui kabar desa. Kabar Desa yang di *posting* melalui *website* Desa Purwogondo hanya terdapat 1 *posting* berita, 1 *posting* kegiatan, serta tidak adanya agenda desa yang ditampilkan di Sistem Informasi Desa (SID).

Pengelolaan *website* desa di Desa Purwogondo bergantung pada sumber daya manusia, yakni perangkat desa itu sendiri. Di dalam rangka pengelolaan *website* desa, Desa Purwogondo telah didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, melalui Bimbingan Teknis pengelolaan *website* desa. Desa Purwogondo juga telah didatangi langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebanyak dua kali terkait *website* desa. Dari hasil uraian tersebut menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai **“Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.”**

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Menurut Chandler and Plano (dalam Keban, 2014:3), Administrasi Publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Pendapat lain mengenai Administrasi Publik dikemukakan oleh Nigro & Nigro, Nigro & Nigro, yang melihat administrasi publik sebagai usaha kerja sama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang, yaitu: yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik, yang sangat membedakan dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan pada proses institusional, yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari sektor swasta.

2. Manajemen Publik

Definisi manajemen menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:92), yakni manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan, melainkan juga sekelompok orang yang bertanggung jawab menjalankan proses tersebut.

Ada tipe manajemen khusus yang disebut sebagai manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman (dalam Keban, 2014:92), mengemukakan bahwa manajemen publik bukan *scientific management*, meskipun sangat dipengaruhi olehnya. Manajemen publik bukan *policy analysis*, bukan juga “administrasi publik baru”, atau kerangka yang lebih baru. Akan tetapi, manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi *rational-instrumental* pada satu pihak dan orientasi politik di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, seperti

planning, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

3. Efektivitas

Menurut Gibson dkk (dalam Pasolong, 2013:4), efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran yang dimaksud menunjukkan derajat efektivitas, kemudian menurut Mardiasmo (2017:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010:143), yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Hal tersebut juga dikatakan oleh Husein dan Lubis (dalam Arindya, 2019:66), yang menyatakan bahwa dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Atau dengan kata lain, suatu organisasi disebut efektif, apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu terdiri dari rangkaian yang terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang bergerak bersama-sama, berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen suatu organisasi (Hartono, 2013:20). Menurut Gordon B. Davis (dalam Ahmad, 2018:15), sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, yang bertujuan untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Sistem informasi manajemen berperan dalam pengolahan data untuk menghasilkan *output* (keluaran) berupa informasi, yang kemudian disajikan sebagai gambaran dalam peningkatan mutu suatu lembaga pemerintah. Sistem informasi manajemen tidak akan terlepas dari peran manusia dan komputerisasi yang memanfaatkan komputer, dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pimpinan lembaga pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan demi tercapainya kebutuhan masyarakat.

Gaol (dalam Sudirman et al, 2020:7), mengatakan *management information system* adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi, yang digunakan sebagai alternatif dalam

melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen. Sistem yang dimaksud berupa sistem yang menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, komputer, model untuk menganalisis, merencanakan, mengendalikan, membuat keputusan, dan sebuah basis data.

Menurut Bodnar (dalam Evayani, 2018:105), beberapa fenomena efektivitas sistem informasi berbasis teknologi adalah sebagai berikut:

1. Keamanan data, berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem.
2. Waktu, berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun non periodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
3. Ketelitian, berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi.
4. Variasi laporan atau *output*, berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Di dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan penghitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
5. Relevansi, menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data.

Selain beberapa fenomena efektivitas sistem informasi di atas, menurut Wower & Widhiyani (2012:13), ukuran efektivitas penerapan sistem informasi yakni kualitas informasi dan teknologi informasi.

1. Kualitas informasi, merupakan tingkat kemampuan sistem untuk menghasilkan informasi yang benar-benar berguna sesuai dengan harapan pengguna.
2. Teknologi informasi, merupakan teknologi komputer yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan didukung sistem yang ada.

5. Sistem Informasi Desa

Badan-badan pemerintahan telah mengembangkan suatu upaya untuk membangun sistem informasi publik. Hal tersebut juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tercermin dengan sangat baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang tersebut berbunyi “Sistem

Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.”

Sistem Informasi Desa (SID) mempunyai dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Di dalam arti sempit, Sistem Informasi Desa (SID) dimaksudkan sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Di dalam arti luas, Sistem Informasi Desa (SID) dapat diartikan sebagai suatu rangkaian atau sistem baik mengenai mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas, (Jahja, Haryana, and Rendra, 2012:19). Menurut Sulistyowati, Dibyorini, and Tyas, (2017:581), secara sederhana Sistem Informasi Desa (SID) didefinisikan sebagai informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa.

C. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimaksudkan agar penelitian menghasilkan kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, sehingga peneliti dapat membahas lebih mengenai sejauh mana efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal serta faktor penghambat efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara menggunakan *interview guide*, dan dokumentasi. Teknik analisis data dan interpretasi data yang digunakan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (Sugiyono 2019:321), yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*), kemudian dianalisis menggunakan analisis taksonomi, yaitu analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan Sugiyono (2019:339).

D. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal

Efektivitas Sistem Informasi adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana Sistem Informasi Desa berjalan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Guna mengetahui Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, analisis

yang digunakan berdasarkan pada fenomena efektivitas sistem informasi dari pendapat Bodnar, serta Wower dan Widhiyani, meliputi relevansi, variasi laporan atau *output*, dan kualitas informasi, yang diuraikan sebagai berikut:

1.1 Relevansi

Perihal relevansi dalam Sistem Informasi Desa, dapat diketahui bahwa terdapat kemudahan dalam mengakses informasi melalui Sistem Informasi Desa. Pada dasarnya, informasi yang relevan akan memberikan dan mempunyai manfaat untuk pemakainya. Pada kenyataannya, kemudahan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa tidak diimbangi oleh ketersediaan informasi disetiap menu-menu yang ada di *website* Sistem Informasi Desa. Hal tersebut mengakibatkan relevansi dalam penyajian informasi belum maksimal. Akibat informasi yang tersedia di Sistem Informasi Desa tidak lengkap, masyarakat memilih datang langsung ke Kantor Kelurahan Desa Purwogondo untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhannya.

Ketidaklengkapan informasi yang tersedia disebabkan oleh ketidakpahaman operator mengenai pentingnya informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya petunjuk dalam pemberian informasi kepada masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa secara berkala mengenai tanggung jawab dari operator Sistem Informasi Desa untuk mengelola Sistem Informasi Desa. Dengan demikian, operator Sistem Informasi Desa dapat mengetahui pentingnya informasi bagi masyarakat yang dihasilkan olehnya, serta merasakan manfaat informasi yang dihasilkan.

1.2 Variasi Laporan atau *Output*

Perihal variasi laporan atau *output* dapat diketahui melalui laporan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Desa secara berkala yang berupa laporan pengunjung *website* Sistem Informasi Desa. Pada *website* Sistem Informasi Desa, dapat diketahui total pengunjung *website* Sistem Informasi Desa, pengunjung bulanan, serta pengunjung *website* yang sedang *online* atau sedang mengakses *website* tersebut. Total pengunjung *website* dari awal bulan Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 94 pengunjung. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat benar-benar ingin mencari atau memperoleh informasi melalui Sistem Informasi Desa.

Variatif atau tidaknya laporan juga bisa dilihat melalui *output* yakni informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan dapat dikatakan belum variatif. Informasi yang tersedia merupakan informasi yang lama tanpa adanya *update* informasi-informasi terbaru mengenai berita

atau kegiatan desa yang telah dilaksanakan. Kemampuan operator untuk menghasilkan informasi yang variatif menjadi penyebab informasi yang dihasilkan tidak berkembang. Peningkatan kreativitas dalam rangka menghasilkan kualitas informasi yang baik sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi yang variatif serta menarik bagi pengguna. Dengan demikian, perlu pemberian kesempatan bagi operator Sistem Informasi Desa untuk mengembangkan dirinya dalam rangka mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Pengembangan diri bagi operator Sistem Informasi Desa juga memerlukan dukungan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa juga perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengintegrasikan teknologi dalam organisasinya.

1.3 Kualitas Informasi

Perihal kualitas informasi, Operator Sistem Informasi Desa telah berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara maksimal agar mudah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pada kenyataannya, informasi yang tersedia belum mampu dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya kelengkapan informasi. Informasi yang dihasilkan juga belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna, dan informasi yang tersedia bukan merupakan informasi yang terbaru. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya Standar Operasional Prosedur untuk memberikan informasi yang berkualitas, yang mengakibatkan dalam memberikan informasi hanya berdasarkan kemampuan yang terbatas, serta kurangnya pelatihan yang mendukung untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Terlebih dukungan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa belum dirasakan oleh operator Sistem Informasi Desa.

Guna menghasilkan informasi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diperlukan adanya peningkatan kemampuan terutama bagi operator, yang bertujuan untuk memberikan informasi secara kreatif agar berguna bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi kantor kelurahan untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Menurut Livari (dalam Rukmiyati dan Budiarta, 2016:123), sebuah sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna akan meningkatkan kepuasan pengguna. Hal ini diwujudkan dengan kecenderungan peningkatan penggunaan sistem informasi tersebut, sebaliknya jika sistem informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna maka kepuasan pengguna tidak akan meningkat dan penggunaan lebih lanjut akan dihindari.

Agar dapat menghasilkan kualitas informasi yang maksimal, maka perlu membangun komunikasi yang baik antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan operator Sistem Informasi Desa atau dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, sehingga terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa dapat dijadikan evaluasi serta ditemukan solusi bersama untuk mengatasi kendala yang ada demi tercapainya tujuan.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal

2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi penghambat dalam efektivitas Sistem Informasi Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aduan dari masyarakat mengenai kurang lengkapnya informasi yang tersedia. Informasi mengenai struktur organisasi desa, visi misi desa, kegiatan-kegiatan desa pada masa pandemi COVID-19 meliputi informasi vaksinasi, bantuan sosial, alur penanganan COVID-19 di tingkat desa, maupun informasi mengenai alur pelayanan pada masa pandemi COVID-19 tidak ditampilkan di *website* Sistem Informasi Desa.

Sumber daya manusia yang mengoperasikan Sistem Informasi Desa berdasarkan hasil wawancara pada dasarnya mereka belum bisa mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, terutama operator Sistem Informasi Desa. Dengan demikian, untuk memberikan informasi dengan berbagai macam variasi masih sulit dilakukan. Keterampilan dari operator untuk memberikan informasi yang berkualitas juga disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang mendukung untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki.

Sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di tingkat desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pelindung, Sekretaris Desa sebagai ketua, dan operator Sistem Informasi Desa sebagai kelompok kerja. Di dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa, ketiga susunan tim di tingkat desa tersebut belum memiliki *job description* yang jelas atau dapat dikatakan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai *job description*. Regulasi yang mengatur hanya terdapat kewajiban Pemerintah Desa secara umum tanpa adanya regulasi mengenai tugas atau kewajiban dari masing-masing susunan tim di tingkat desa. Dengan demikian, perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur *job description* dari masing-masing tim di tingkat desa, yang bertujuan agar tim tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya guna memaksimalkan pengelolaan Sistem Informasi Desa.

2.2 Prosedur

Faktor penghambat efektivitas Sistem Informasi Desa di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal adalah berkaitan dengan prosedur. Di dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa, terlihat bahwa belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan informasi yang berkualitas, yang mengakibatkan dalam memberikan informasi hanya berdasarkan kemampuan yang terbatas. Dengan demikian, memerlukan Standar Operasional Prosedur untuk memberikan informasi yang berkualitas, agar tujuan dari penerapan Sistem Informasi Desa dapat tercapai dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ada.

2.3 Komunikasi

Faktor komunikasi menjadi penghambat dalam Sistem Informasi Desa di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Hal tersebut dibuktikan belum adanya komunikasi atau peran yang terbangun dari Kepala Desa sebagai pelindung maupun dari Sekretaris Desa sebagai ketua pengelola Sistem Informasi Desa. Dukungan dari Kepala Desa maupun Sekretaris Desa yang diberikan belum dirasakan oleh operator Sistem Informasi Desa. Dengan demikian, Kepala Desa dapat mengintegrasikan visi dan misinya mengenai peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Desa sebagai bentuk dukungan agar tujuan dapat tercapai.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal

Ukuran efektivitas yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari relevansi, variasi laporan atau *output*, dan kualitas informasi. Perihal relevansi dapat dikatakan tidak efektif, yang ditandai dengan tidak adanya informasi yang lengkap di setiap menu-menu yang tersedia di Sistem Informasi Desa. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat memilih mendatangi langsung Kantor Kelurahan Desa Purwogondo untuk memperoleh informasi, karena dirasa informasi di Sistem Informasi Desa tidak lengkap. Variasi laporan atau *output* yang ada dapat dikatakan tidak efektif. Variasi laporan dapat diketahui salah satunya melalui total pengunjung *website* Sistem Informasi Desa. Disisi lain, informasi yang tersedia tidak variatif karena informasi tidak di *update* untuk memberikan informasi-informasi terbaru, kemudian perihal kualitas informasi dapat dikatakan tidak efektif. Informasi yang tersedia belum dapat dipahami oleh masyarakat, karena informasi yang tersedia tidak lengkap. Informasi yang dihasilkan juga

belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna, serta informasi tersebut bukanlah informasi yang terbaru.

b. Faktor penghambat Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal

Pertama, Sumber daya manusia yang mengoperasikan Sistem Informasi Desa pada dasarnya mereka belum bisa mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, terutama operator Sistem Informasi Desa. Dengan demikian, untuk memberikan informasi dengan berbagai macam variasi masih sulit dilakukan. Keterampilan dari operator untuk memberikan informasi yang berkualitas juga disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang mendukung untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di tingkat desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pelindung, Sekretaris Desa sebagai ketua, dan operator Sistem Informasi Desa sebagai kelompok kerja. Di dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa, ketiga susunan tim di tingkat desa tersebut belum memiliki *job description* yang jelas atau dapat dikatakan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai *job description*. Regulasi yang mengatur hanya terdapat kewajiban Pemerintah Desa secara umum tanpa adanya regulasi mengenai tugas atau kewajiban dari masing-masing tim di tingkat desa.

Kedua, faktor prosedur juga menjadi penghambat dalam efektivitas Sistem Informasi Desa di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, yang ditandai dengan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan informasi yang berkualitas, yang mengakibatkan dalam memberikan informasi hanya berdasarkan kemampuan terbatas.

Ketiga, faktor komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya komunikasi atau peran yang terbangun dari Kepala Desa sebagai pelindung maupun dari Sekretaris Desa sebagai ketua pengelola Sistem Informasi Desa. Dukungan dari Kepala Desa maupun Sekretaris Desa yang diberikan belum dirasakan oleh operator Sistem Informasi Desa.

2. Saran

a. Sumber Daya Manusia

Perlu adanya perubahan struktur pengelola Sistem Informasi Desa dengan cara melakukan pengelompokan tugas-tugas masing-masing Perangkat Desa, sehingga dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan kemampuan dari Perangkat Desa untuk mengelola Sistem Informasi Desa, serta perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur

job description dari masing-masing tim di tingkat desa, yang bertujuan agar tim tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya guna memaksimalkan pengelolaan Sistem Informasi Desa.

b. Prosedur

Perlunya pembuatan Standar Operasional Prosedur untuk memberikan informasi yang berkualitas, agar dapat ditemukan kesepakatan informasi beserta format isi informasi yang seharusnya dimuat di Sistem Informasi Desa. Dengan demikian, penerapan Sistem Informasi Desa dapat tercapai dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ada.

c. Komunikasi

Kepala Desa dapat mengintegrasikan visi dan misinya mengenai peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Desa sebagai bentuk dukungan, yang bertujuan agar tujuan dari penerapan Sistem Informasi Desa dapat tercapai.

F. REFERENSI

- Ahmad, Lukman. 2018. *Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi: Sistem Informasi Manajemen*. KITA Publisher.
- Arindya, Radita. 2019. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi*. MEDIA SAHABAT CENDEKIA.
- Derry, Adya Karega. 2019. "Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017." *Jurnal Government Of Science*.
- Evayani, Evayani. 2018. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA HOTEL-HOTEL BERBINTANG DI BANDA ACEH)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3(1): 103–10.
- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pasolong, Harbani. 2013. "Teori Administrasi Publik, Cetakan Kelima, CV." *Alfabeta, Bandung*.
- Rukmiyati, N. M. S., & Budiarta, I. K. 2016. "Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi Dan Perceived Usefulness Pada Kepuasan Pengguna Akhir Software Akuntansi

(Studi Empiris Pada Hotel Berbintang Di Provinsi Bali).” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5(1): 115–42.

Suaedi, Falih dan Wardiyanto Bintoro. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudirman, Acai et al. 2020. *Sistem Informasi Manajemen*. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wower, Sri Dewi Danu Utami. 2012. “Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada SKPD Pemkab Tabanan.” *E-Jurnal Akuntansi* 1(1).